

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena globalisasi ekonomi saat ini memberikan kesadaran bagi semua pihak untuk dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Herawati, 2013). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dengan saat ini masih merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Hampir setiap warga Negara membutuhkan produksi dari BUMN, dengan keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya (Zarkasyi, 2008:2). Tuntutan terkait tata kelola yang baik atau *good corporate governance* pada BUMN muncul karena BUMN dianggap dikelola secara kurang transparan dan kurang profesional (Herawati, 2013).

Sebagai entitas bisnis, peran BUMN dirasakan cukup dominan, karena jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata digolongkan strategis. Oleh karena hal tersebut, maka tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Namun BUMN belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance*. Masih terdapat banyak kesalahan, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang rendah karena tidak adanya transparansi, diantaranya meliputi kemandekan pelaksanaan audit asset Negara yang tidak dikelola secara transparan, tidak terdapat

---

penyajian yang rinci kepada publik, sehingga sering menyebabkan kecurangan atau *fraud* seperti *mark up* maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. (Herawati, 2013).

Salah satu kasus kecurangan atau fraud pada BUMN terjadi pada PT. Bank Indonesia (BNI) 1946 yang baru terungkap tahun 2012, yaitu terjadi pembobolan pada bank tersebut. Kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mendapatkan dana sebesar Rp. 195 miliar dari BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. Agus Salim selaku Kepala BNI Cabang Radio Dalam lantas memindahkan dana tersebut ke rekening financial A sebesar Rp. 50 miliar, dan ke rekening Dedi Suryawan sebesar Rp. 145 miliar. Akibat perbuatan ketiganya, Negara dalam hal ini PT. BNI dirugikan sebesar Rp. 50 miliar (Maulana, 2012) dalam (Herawati, 2013).

Kasus lain adalah kasus yang terjadi pada PT. Kimia Farma, yang merupakan salah satu dari produsen obat-obatan milik pemerintah yang ada di Indonesia. Bermula pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar rupiah, dan laporan tersebut di audit oleh KAP Hans Tuanakotta & Mustofa(HTM). Namun, Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa, sehingga perlu dilaksanakan audit ulang. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma, dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya kepada PT. Kimia Farma. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan

---

persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan, sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak di-*sampling* oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi (Purnawan, 2014)

Kasus-kasus kecurangan seperti yang sudah diuraikan di atas timbul karena masalah keagenan atau *agency problems*. *Agency problems* timbul karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau pihak prinsipal dengan pihak pengurus atau manajemen atau pihak agen (Surya dan Yustiavandana, 2008:2). Penerapan *corporate governance* menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya untuk menekan potensi konflik kepentingan (Surya dan Yustiavandana, 2008:6).

Kebutuhan *stakeholder* akan transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan telah mendorong pada perlunya peran seorang auditor internal perusahaan yang akan bertanggung jawab dalam menyiapkan data keuangan dan data operasional yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah di mengerti dan relevan bagi para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Dimana transparansi dan akuntabilitas merupakan beberapa prinsip *good corporate governance* (Hery, 2010:4).

Penegakan prinsip *good corporate governance* dalam rangka memberikan akses informasi kepada publik menuntut kualitas manajemen perusahaan dan tenaga penunjang yang lebih profesional. Auditor internal, selaku tenaga penunjang perusahaan, di antaranya harus dapat menjamin terselenggaranya penyebaran informasi

---

secara efisien dan efektif, untuk memberikan akses yang wajar kepada para pemakai informasi (Hery, 2010:5).

Fungsi audit internal yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian. Audit internal merupakan dukungan penting bagi komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen senior dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *corporate governance* (Zarkasyi, 2008:14).

Auditor internal adalah bagian dari organisasi. Auditor internal melayani organisasi dengan membantu organisasi mencapai tujuan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, mengevaluasi manajemen risiko, dan pengendalian internal (Hery, 2010:44). Kode etik profesi audit internal melalui *Code of Ethics dari Institute of Internal Auditors (IIA)* 17 Juni 2000, menekankan bahwa kegiatan rutin audit internal adalah menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola (Tunggal, 2014:91).

Secara garis besar peran audit internal dalam manajemen risiko adalah memberikan jaminan secara objektif kepada manajemen senior atas efektivitas manajemen risiko. Auditor dalam hal ini menjamin bahwa risiko bisnis telah dikelola secara tepat dan menjamin bahwa pengendalian internal telah berjalan secara efektif (Hery, 2010:45). Selain itu audit internal dapat membantu organisasi dengan cara meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko dengan pendekatan yang terdisiplin dan sistematis yaitu melalui *Enterprise Risk Management (ERM)* (Whardani, 2014)

---

*Enterprise risk management* merupakan hal fundamental bagi sebuah perusahaan dalam pendekatannya terhadap area risiko yang luas, antara lain fluktuasi mata uang, isu mengenai sumber daya manusia, dan isu *corporate governance* sehubungan dengan *Sarbanes-Oxley Act* (Sarbox). Penerapan *Sarbanes-Oxley Act* sendiri memiliki 4 tujuan yaitu (Tunggal, 2014:142,196):

- Meningkatkan akuntabilitas manajemen perusahaan publik
- Memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan
- Meningkatkan pengawasan terhadap kantor akuntan publik
- Mengembalikan kepercayaan para investor terhadap pasar modal

*Enterprise risk management* menekankan pentingnya mengelola risiko sesuai selera terhadap risiko (*risk appetite*) dari perusahaan. *Risk appetite* diartikan sebagai besarnya risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. *COSO ERM framework* membagi tujuan (*objectives*) manajemen risiko perusahaan ke dalam 4 kategori besar, yaitu : 1) *Strategic ERM Objectives*; 2) *Operatioanl ERM Objectives*; 3) *ERM Reporting Objectives*; 4) *ERM Compliance Objectives*. COSO ERM mengusulkan bahwa *risk appetite* secara eksplisit dikomunikasikan ke seluruh perusahaan, tujuannya adalah untuk menyesuaikan tingkat risiko yang dapat diterima tersebut ke seluruh manajer, kepala unit dan staf, termasuk pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Tunggal, 2014:144)

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian Merry (2012), dengan judul “Pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* dengan *enterprise risk management* sebagai variabel intervenning.” Penelitian tersebut dilaksanakan pada

---

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* dengan *enterprise risk management* sebagai variabel intervenning.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* SEBAGAI VARIABEL INTERVENNING (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Bandung).”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* dengan *enterprise risk management* sebagai variabel intervenning ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* dalam kaitannya dengan *enterprise risk management*. Sesuai identifikasi masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap *good corporate governance* dengan *enterprise risk management* sebagai variabel intervening.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Akademisi

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *good corporate governance* yang selama ini penulis peroleh dari artikel, jurnal maupun topik-topik yang ada pada dunia usaha di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada di Indonesia khususnya pada BUMN. Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian peneliti lainnya dalam pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai peran audit internal dalam perusahaan untuk ikut serta dalam mewujudkan *good corporate governance*.

2. Praktisi Bisnis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau memberikan gambaran perusahaan akan pentingnya penerapan *good corporate governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.